

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) PADA KANTOR
PERTANAHAN KOTA SAMARINDA**

Akidatul Iszah, Bambang Irawan

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 3, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) Pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Pengarang : Akidatul Iszah

NIM : 1702015100

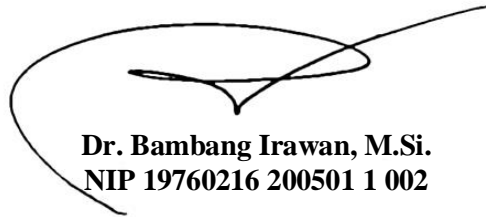
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Juli 2023

Pembimbing,



Dr. Bambang Irawan, M.Si.
NIP 19760216 200501 1 002

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Program Studi Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 3	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 670-681	

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANAHAN NASIONAL (SIMTANAS) PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA

Akidatul Iszah ¹, Bambang Irawan ²

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional atau SIMTANAS pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan mengetahui kendala yang muncul selama proses implementasi SIMTANAS di kantor Pertanahan Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif dan berlokasi di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Fokus penelitian yang diambil berdasarkan pendekatan model implementasi dari Donal Van Metter & Carl Van Horn yang terdiri dari enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya yang digunakan, Karakteristik badan pelaksana kebijakan, sikap pelaksana kebijakan, karakteristik agen pelaksana kebijakan, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sumber data dalam penelitian ini melalui wawancara secara mendalam dengan Key Informan yaitu, Analis SDM Aparatur Pertanahan Kota Samarinda, pegawai kantor Pertanahan yang terlibat dalam Implementasi SIMTANAS, serta masyarakat yang menggunakan layanan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan selama penelitian dengan cara observasi serta dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan SIMTANAS, standar dan kebijakan yang ada sudah sesuai, sumber daya yang tersedia juga sudah cukup namun beberapa dari sarana prasarana yang ada tidak semua dalam kondisi baik. Kantor Pertanahan Kota Samarinda juga berkoordinasi dengan baik dengan kantor pertanahan daerah lain serta Kementerian ATR/BPN. Para karyawan dan masyarakat juga menyambut baik penerapan SIMTANAS, serta inovasi alur pelayanan dan pendataan pertanahan yang jauh lebih mudah dan efisien. Selain masalah sarana dan prasarana, ditemukan kendala lain yaitu kesulitan masyarakat untuk memahami dan memperoleh Informasi, dan website resmi milik Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang tidak bisa diakses.

Kata Kunci : *Manajemen Pertanahan, SIMTANAS, Sistem Informasi Manajemen*

Pendahuluan

Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berguna untuk membantu perusahaan-perusahaan dalam mengintegrasikan data, mempercepat dan memsistematisasi pengolahan data, meningkatkan kualitas informasi dan kontrol

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: isah655@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

manajemen, mendorong terciptanya produk-produk baru, meningkatkan layanan dan kontrol, mengotomatisasi sebagian pekerjaan rutin, dan menyederhanakan alur kerja, (Oetomo 2006). Mengikuti pesatnya perkembangan organisasi publik yang ada pada saat ini khususnya dibidang administrasi publik, membuat rangkaian kerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada organisasi publik menjadi kebutuhan yang penting.

Berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan beberapa agenda kebijakan yang dimaksudkan untuk mendukung dan juga melaksanakan tugas pemerintahan yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) sudah menjadi salah satu agenda kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional di setiap kota di Indonesia. SIMTANAS sendiri merupakan suatu sistem terpadu yang dapat mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan pada Badan Pertanahan Nasional, sehubungan dengan pengelolaan bidang pertanahan dan pelayanan kepada masyarakat. Badan Pertanahan Nasional dengan melalui Instruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 2/ins/v mewajibkan seluruh kantor pertanahan untuk menerapkan tentang pelaksanaan pelayanan dalam bidang pertanahan yang dapat diakses oleh masyarakat secara nasional dan telah diseragamkan (Syaprianto 2018). Kumorotomo and Margono (2009) mengatakan bahwa pengembangan sistem manajemen yang tepat sasaran dapat menciptakan sistem manajemen yang responsif dan efisien, sehingga dengan sistem manajemen yang tanggap dan efisien segala kendala dalam pelayanan publik pada sebuah instansi dapat segera ditanggapi dan juga diperbaiki.

Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda menjadi salah satu badan yang telah melaksanakan kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dalam melaksanakan tugasnya. Dalam proses observasi lapangan yang telah dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda sendiri, jika dilihat Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah memiliki beberapa inovasi untuk membantu kebutuhan masyarakat dalam bidang administrasi pertanahan. Hal itu merupakan wujud dari penerapan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda?

2. Apa saja kendala yang timbul selama implementasi kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda?

Kerangka Dasar Teori *Implementasi Kebijakan*

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintahan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Kebijakan publik, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu, dimana tujuan kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab 2012), Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Agustino (2017) implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Teradat beberapa model kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli, dalam Agustino (2017) salah satu model kebijakan itu adalah teori Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn, dimana model pendekatan *top-down* ini disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variable. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Enam variabel menurut Van Metter & Van Horn yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap atau kecendrungan; komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana; dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

1. Standar dan tujuan kebijakan

Standar yang diberikan serta tujuan dari adanya kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di implementasikan dengan baik, karena jika standard dan tujuan kebijakan tidak jelas akan menimbulkan lebih banyak masalah dan juga konflik antar pelaksana kebijakan.

2. Sumber daya yang digunakan.

Meliputi sumber daya manusia dan non manusia yang baik guna mendukung terlaksananya kebijakan yang sudah ditetapkan.

3. Karakteristik pelaksana kebijakan

Sikap berbagai pihak pelaksana yang mencangkup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan antar pihak yang akan mempengaruhi penerapan kebijakan.

4. *Sikap atau kecenderungan para pelaksanakan kebijakan yang terlibat*
Sikap atau kecenderungan para melaksanakan kebijakan ini mencakup tiga hal, yang pertama respon pelaksana terhadap kebijakan yang akan dipengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kedua kognisi, yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan ketiga intensitas sikap pelaksana kebijakan, yakni prefansi nilai yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan.
5. *Karakteristik badan-badan pelaksana kebijakan*
Kerjasama dan koordinasi antar badan pelaksana yang mendukung terlaksananya kebijakan dengan baik
6. *Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.*
Variabel ini mencakup pada sumber daya ekonomi, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok kelompok kepentingan dapat memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan

Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional

Sistem Informasi manajemen adalah sebuah rangkaian yang terorganisasi dari sejumlah bagian/komponen yang secara bersama sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi untuk digunakan dalam sebuah manajemen perusahaan. Dalam Kumorotomo dan Margono (2009) disebutkan bahwa konsep Tatanan Pengambilan Keputusan Berkewenangan yang diterapkan secara nasional menjadi landasan dari adanya Sistem Informasi Manajemen Nasional (SIMNAS) yang menjadi awal dari adanya Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS).

Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang begitu pesat pada sektor pertanahan dalam bidang sistem informasi dan manajemen. Pemerintah mengeluarkan kebijakan SIMTANAS untuk mengatasi segala urusan dalam pelayanan bidang pertanahan untuk membuat pelayanan publik agar lebih efektif dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanahan. SIMTANAS sendiri merupakan suatu sistem yang berguna untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan pada Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan pengelolaan bidang-bidang tanah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Badan Pertanahan pada pasal 1 huruf b, Badan Pertanahan Nasional ditugaskan untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi

dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS). Tujuan dari adanya SIMTANAS adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dibidang pertanahan. Secara eksternal SIMTANAS bertujuan untuk membantu memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan informasi dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan prosedur. Secara internal tujuan SIMTANAS adalah membantu pejabat struktural dalam memperoleh informasi tentang kinerja kantor berupa laporan secara cepat, akurat, dan aktual.

Pelayanan pertanahan pada Kantor badan Pertanahan yang pada prinsipnya merupakan pelayanan data dan informasi pertanahan, data yang telah tersimpan pada kantor pertanahan merupakan data yang diperoleh dan diolah melalui proses yang rumit dan panjang mengikuti aturan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP). Pembaruan data akan selalu dilakukan apabila terdapat perubahan pada subjek atau objek hak atas tanah, dan karena sifatnya yang sangat dinamis itu, maka data pertanahan mempunyai tingkat pengambilan dan pembaruan yang cukup tinggi, dengan menggunakan SIMTANAS pembaruan dari setiap pengambilan dan perubahan data yang terjadi pada data pertanahan dapat tersinkronisasi dengan baik dan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yang ditujukan untuk mendeskripsikan berbagai fenomena yang ada. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan SIMTANAS pada kantor pertanahan Kota Samarinda, yang dipengaruhi oleh enam variabel menurut Donal Van Metter & Carl Van Horn, yaitu standar dan tujuan kebijakan; sumber daya yang digunakan; karakteristik badan-badan pelaksana kebijakan; sikap dan kecenderungan para pelaksana kebijakan yang terlibat; karakteristik agen pelaksana kebijakan; dan kondisi sosial ekonomi dan politik.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala selama proses implementasi kebijakan SIMTANAS pada kantor pertanahan Kota Samarinda sehingga menghambat penerapan SIMTANAS.

Sumber data dalam penelitian ini peneliti memilih beberapa narasumber yaitu, Analis SDM Aparatur Pertanahan Kota Samarinda yang menjadi *Key Informant*, pegawai kantor Pertanahan yang terlibat dalam Implementasi SIMTANAS, serta masyarakat yang menggunakan layanan di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Peneliti juga menggunakan beberapa literature sebagai sumber data, seperti buku, jurnal yang berhubungan dengan penelitian, website, artikel, dan referensi-referensi yang menjadi panduan penyusunan pelaksanaan kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Untuk teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu Observasi, Wawancara, Dokumenter dan Triangulasi. Serta teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan proses analisis data model interaktif analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yaitu analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yang terdiri Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi SIMTANAS pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda merupakan salah satu badan yang telah melaksanakan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda, mengingat tentang sistem yang sebelumnya diterapkan dimana sebagian besar kegiatan administrasi dan juga pelayanan dilakukan dengan cara konvensional, termasuk pada proses pendataan, pendaftaran, dan juga pengarsipan berkas pertanahan membuat sering terjadinya kesalahan berupa tumpang tindih data antar kantor pertanahan satu dengan lainnya dan juga sering terjadinya kehilangan data. Tentu saja hal tersebut menjadi tantangan besar yang harus diperbaiki oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda sebagai badan yang mengelolah data pertanahan agar lebih baik.

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino 2017) bahwa dalam setiap pelaksanaan kebijakan publik haruslah mempunyai standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Standar yang menjadi pedoman bagi para pelaksana kebijakan SIMTANAS pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda sendiri mengacu pada PERMENPAN (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bab II

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti temukan, dapat dilihat bahwa standar yang dibuat dan diterapkan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda terkait dengan pelaksanaan SIMTANAS sudah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Standar atau pedoman yang sudah sesuai ini telah dibuktikan dengan terlaksananya SIMTANAS yang berjalan lancar serta para pelaksana kebijakan yang merasa terbantu dengan pedoman yang ada saat ini.

Dalam penerapan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah melaksanakan sosialisasi guna memastikan agar para pegawai memahami tentang standar pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Selanjutnya mengenai kejelasan tujuan dan juga sasaran kebijakan, dimana dari penelitian yang telah dilakukan kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan SIMTANAS sudah dikategorikan baik. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya mengenai SIMTANAS, tujuan dari adanya SIMTANAS adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dibidang pertanahan, secara eksternal SIMTANAS bertujuan untuk membantu memudahkan masyarakat dalam proses mendapatkan informasi dari sisi waktu, biaya, tenaga, dan prosedur. Secara internal tujuan SIMTANAS

adalah membantu pejabat struktural dalam memperoleh informasi tentang kinerja kantor berupa laporan secara cepat, akurat, dan aktual.

Dalam analisa yang dilakukan oleh peneliti, baik dari hasil wawancara maupun hasil observasi dan dokumentasi dapat dilihat bahwa dalam hal standar dan tujuan kebijakan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda sudah sangat jelas dan terukur, dengan penyusunan standar dan pedoman yang telah sesuai dengan ketentuan dari Kementrian dan juga kondisi lapangan, serta sasaran serta tujuan yang sudah sangat jelas sehingga para pekerja dapat mengerjakan tugasnya dengan baik.

b. Sumber Daya yang Digunakan

Dukungan dari sumberdaya yang baik dalam suatu implementasi kebijakan sangatlah dibutuhkan, baik untuk sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*) (Sutabri 2005). Dalam pelaksanaan kebijakan, sumberdaya manusia menjadi hal penting dari keberhasilan implementasi kebijakan, maka dari itu sumberdaya manusia harus memiliki kompetensi yang baik serta memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan apa yang akan dikerjakannantinya.

Dari data yang telah peneliti peroleh ditemukan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda yang dimana sumberdaya manusia yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan sudah memadai dan posisi yang ditempati sudah sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan SDM sudah memadai adalah jumlah dari SDM yang sudah memenuhi atau mencukupi dalam mengisi posisi yang ada, sedangkan yang dimaksud dengan SDM yang sudah sesuai adalah SDM yang tingkat pendidikannya dan kompentensinya udah relevan dengan posisi yang ditempati sesuai dengan kebutuhan implementasi.

Selain daripada sumber daya manusia, sumber daya lainnya yaitu sumber daya finansial juga menjadi sebuah perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kantor pertanahan Kota Samarinda saat ini sudah memiliki cukup dana dalam hal pendanaan untuk melaksanakan SIMTANAS ini karena didukung juga oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Kemudian selain daripada sumber daya manusia dan anggaran yang penting, sumber daya lain yang juga harus disokong adalah sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Sumber daya sarana dan prasarana juga menjadi penggerak agar sumber daya manusia bekerja dengan lancar dan juga memudahkan pekerjaan. Dari hasil penelitian yang didapat walaupun memiliki sarapan dan prasarana yang memadai, tidak semua fasilitas memiliki kondisi yang baik dan cukup menghambat pekerjaan para pegawai, dan hal ini tentu saja menjadi masalah dalam hal sumberdaya dalam penerapan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, sumber daya yang digunakan sudah baik dan juga mencukupi untuk terlaksananya SIMTANAS, dalam hal sumber daya finansial juga Kantor Pertanahan Kota Samarinda sudah

merasa cukup dengan aliran dana dari APBN yang digunakan untuk menunjang penerapan SIMTANAS. Untuk sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia sudah lengkap dan juga mencukupi namun yang menjadi kendala adalah kondisi dari beberapa sarana dan prasarana yang kurang baik sehingga dapat menghambat pekerjaan para pegawai.

c. Karakteristik Badan Pelaksana Kebijakan

Dalam Agustino (2017) Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa dalam implementasi kebijakan koordinasi antar badan pelaksana kebijakan merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya terhadap kesalahan akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya.

Dalam penerapan SIMTANAS Kantor Pertanahan Kota Samarinda tidak melibatkan pihak diluar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik untuk tahap persiapan sampai ke tahap pelaksanaan. Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kota Samarinda dengan badan diluar dari Kementerian ATR/BPN seperti PLN, Kejaksaan Tinggi, dan Politani yang pernah terlaksana berupa MoU atau *Memorandum of Understanding* yang tidak berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan SIMTANAS sejauh ini.

Khusus untuk pelaksanaan SIMTANAS badan-badan lain yang terlibat meliputi Kementerian ATR/BPN dan juga kantor pertanahan dari daerah lain, dimana Kantor Pertanahan Kota Samarinda melakukan koordinasi dengan menyampaikan segala informasi dengan baik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam proses komunikasi yang dilakukan dengan Kementerian ATR/BPN, Kantor Pertanahan Kota Samarinda dilakukan secara sistematis yang bisa dipantau langsung oleh Kementerian ATR/BPN melalui sistem yang ada, sehingga proses komunikasi bisa berjalan dengan tepat dan akurat dan tidak pernah terjadi kendala dalam hal ini.

d. Sikap dan kecenderungan para pelaksana kebijakan yang terlibat

Sikap atau kecenderungan para pelaksana kebijakan menurut Winarno (2012) yang mengatakan bahwa penerapan kebijakan yang berhasil harus diikuti dengan kesadaran terhadap kebijakan tersebut, jika tidak sering diakibatkan oleh ketidaktaatan para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda menunjukkan bahwa disposisi implementor dalam pelaksanaan SIMTANAS ini telah berhasil, yang artinya bahwa para staf kantor pertanahan Kota Samarinda yang dalam hal ini berperan sebagai implementor sudah mengetahui dan juga memahami apa dan bagaimana SIMTANAS itu sendiri, karena sebelum bekerja para pegawai akan diberikan pembekalan terlebih dahulu dan juga para pegawai dibekali dengan pedoman serta standar yang harus mereka ikuti.

Kesuksesan suatu kebijakan ini juga bisa kita lihat dari komitmen para pelaksana kebijakan dalam melaksanakannya. Dalam hal ini para staf kantor pertanahan Kota Samarinda sebagai pelaksana kebijakan SIMTANAS dan selama proses implementasi para staf memberikan respon yang sangat baik dengan selalu konsisten sebagai implementor kebijakan sehingga bukti nyata peningkatan kinerja para pegawai bisa terlihat cukup signifikan.

e. Karakteristik Pelaksana Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (20012), bahwa karakteristik dari pelaksanaan kebijakan mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan sangat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Perubahan alur pelayanan sebagai salah satu wujud pelaksana SIMTANAS memang tidak bisa dihindari karena penyesuaian dari sistem yang lama ke SIMTANAS yang lebih baru.

Dari hasil observasi yang telah dilakukan dimana antara sebelum dan setelah diterapkan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda hal yang paling mencolok dari perubahan itu adalah struktur dan juga standar operasional. Karena penerapan SIMTANAS yang meninggalkan sistem lama yang konvensional, perubahan susunan staf dan juga standar operasional sudah pasti terjadi demi menunjang terlaksananya SIMTANAS yang optimal. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional menjadi tanggung jawab dari Subbagian Tatausaha, Seksi Survei dan Penetapan, dan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran yang ditangani langsung oleh tenaga IT masing-masing seksi dan operator masing-masing bidang. Dimana bidang ini juga dalam koordinir langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Penerapan SIMTANAS pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda memberikan perubahan dalam karakteristik pelayanan yang ada menjadi lebih baik, dibuktikan dengan alur pelayanan dan pendataan pertanahan yang jauh lebih mudah dan efisien, karena sistem yang digunakan telah secara online dan telah tersambung langsung dengan server pada Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan yang sering terjadi seperti tumpang tindih data.

f. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) mengenai Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik yang mengatakan bahwa, kondisi sosial, politik dan ekonomi turut mempengaruhi penerapan suatu kebijakan. Dampak dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi sangat mempengaruhi hasil-hasil kebijakan dan mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian dari badan-badan pelaksana kebijakan. Hal ini juga mencakup pada sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana dukungan diberikan kepada implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yaitu menolak atau

mendukung, bagaimana sifat dan opini publik yang ada dalam lingkungan dan apakah para elit politik mendukung implelementasi kebijakan tersebut.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kondisi sosial, politik dan ekonomi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Semua itu dapat dibuktikan dengan elit politik yang mendukung pelaksanaan kebijakan SIMTANAS di kantor ini dan juga dukungan positif yang datang dari masyarakat dengan memberikan saran serta masukan untuk memperbaiki pelayanan yang ada, serta adanya dukungan dana yang diberikan juga turut mendukung pelaksanaan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda sehingga pelaksanaan SIMTANAS dapat berjalan dengan baik.

Kendala-kendala yang timbul selama proses Implementasi (SIMTANAS) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda

Dalam pelaksanaannya sendiri, SIMTANAS tidak selalu mulus dalam proses pelaksanaannya dengan kata lain masih terdapat beberapa kendala yang masih nampak sebagai penghambat pelaksanaan SIMTANAS dengan maksimal. Dari hasil observasi dan juga wawancara yang dilakukan kendala yang timbul selama proses implementasi SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda ini sendiri berasal dari beberapa faktor.

Hal yang menjadi salah satu kendala dalam penerapan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda adalah terkait dengan sarana dan prasarana, alaupun ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sudah cukup namun tidak semua dalam kondisi baik, rusaknya beberapa peralatan untuk menunjang pekerjaan para pegawai cukup menghambat pekerjaan mereka. Sebagai salah satu dari sumber daya yang digunakan dalam penerapan SIMTANAS, tentunya kondisi sarana dan prasarana akan sangat mempengaruhi kinerja para pekerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing. Kondisi beberapa peralatan yang kurang baik serta respon yang lamban untuk memperbaiki peralatan yang rusak membuat penerapan SIMTANAS menjadi tidak maksimal.

Selanjutnya kendala yang juga ditemukan adalah website resmi milih Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang tidak bisa diakses sehingga masyarakat kesulitan untuk mendapat informasi yang valid. Hal ini menyebabkan masyarakat harus mencari Informasi dari pihak ketiga yang sering kali tidak tepat dan tidak lengkap. Walaupun telah tersedia sosial media resmi milih Kantor Pertanahan Kota Samarinda, namun masyarakat merasa sulit untuk menemukan Informasi yang mereka butuhkan di sosial media yang ada. Hal ini menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda, agar penerapan SIMTANAS menjadi lebih baik.

Meskipun Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah melakukan sosialisasi diberbagai platform baik online maupun offline, nyatanya banyak masyarakat yang kebingungan dan tidak paham dan akhirnya harus datang langsung ke Kantor Pertanahan hingga harus bolak balik beberapa kali untuk mengurus keperluan mereka. Beberapa pernyataan masyakat yang menyatakan bahwa

gambaran alur pelayanan Pertanahan yang ribet dan sulit dimengerti masih tidak bisa dilepaskan walaupun sudah diterapkan SIMTANAS di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Ketidakpahaman masyarakat akan pelayanan yang ada ini menjadi suatu masalah dan membuat pelayanan berlangsung lebih lama karena masyarakat harus berulang kali memperbaiki atau melengkapi berkas yang ada.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan berkaitan dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda sesuai dengan fokus penelitian maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Dalam Standar dan sasaran kebijakan SIMTANAS pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda memiliki standar pelaksanaan yang sudah sesuai dengan PERMENPAN. Dan juga sudah memiliki tujuan yang jelas baik secara eksternal maupun internal.
2. Sumber daya yang digunakan selamam proses implementasi sudah cukup memadai mulai dari SDM yang sudah sangat sesuai dan mencukupi kebutuhan, dan sumber anggaran yang juga sudah cukup untuk menunjang penerapan SIMTANAS. Selain itu Sarana dan Prasarana yang ada dalam hal jumlah sudah mencukupi untuk menunjang penerapan SIMTANAS namun beberapa sarana dan prasarana tidak dalam kondisi baik.
3. Hubungan antar organisasi, Kantor Pertanahan Kota Samarinda bekerja sama dengan Kementrian ATR/BPN dan juga kantor pertanahan daerah lain dengan saling berkoordinasi dan bekerjasama.
4. Disposisi para implementor SIMTANAS sangat baik dengan respon dari para pekerja yang sangat baik dan juga meningkatnya semangat kerja yang konsisten dengan penerapan SIMTANAS.
5. Karakteristik pelaksana kebijakan yang lebih baik dengan alur pelayanan dan juga proses pendataan pertanahan yang jauh lebih mudah dan efisien.
6. Kondisi sosial ekonomi dan politik sudah sangat baik dengan dukungan yang terima dari Kementrian ATR/BPN dan juga dukungan positif dari masyarakat pengguna layanan, serta adanya dukungan dana yang digunakan untuk penerapan SIMTANAS di Kota Samarinda.

Saran

Dengan mengacu pada bagaimana hasil dan juga pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda, ada beberapa saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat dipertimbangkan dan memberikan manfaat untuk pihak terkait yang khususnya untuk Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Kantor Pertanahan Kota Samarinda dapat membantu masyarakat dalam memahami proses pelayanan yang ada dengan lebih

menyederhanakan penyampaian alur pelayanan yang ada dan juga memperluas jangkauan informasi agar dapat diakses masyarakat dengan mudah.

2. Sebagai media informasi resmi bagi Kantor Pertanahan Kota Samarinda, sebaiknya segera dilakukan perbaikan pada website resmi kantor agar informasi yang diperoleh masyarakat lebih jelas dan juga akurat.
3. Dalam hal memperbaiki atau memperbarui fasilitas yang rusak, sebaiknya dapat dilakukan dengan lebih responsif agar tidak menghambat pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Hartono, Bambang. 2017. *Sistem Informasi Manajemen: Berbasis Komputer*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan
- Kumorotomo, Wahyudi, dan Suabando Agus Margono. 2009. *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles, Matthew B & A.M Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, diterjemahkan T.R.Rohidi, UI Pers, Jakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma. 2006. *Perencanaan dan Pembangunan Sistem Infromasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nomor 15 tahun 2014.
- Sutabri, Tata .2005. *Sistem Informasi Manajemen*.2005. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Syaprianto. 2018. "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan". Jurnal Wedana, IV (2), 534-539.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses,dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pressindo.